



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRHAS RAHMANUDDIN RAYES
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 59136

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.241.750.000**

1. Tanah Seluas 20900 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 292 m2/95 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 5100 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 547 m2/250 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, WARISAN Rp. 125.000.000
6. Tanah Seluas 13957 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 667 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 166.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **204.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 D SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA BR-V DG1 1.5 ECVT/1500 CC Tahun 2016, WARISAN Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **386.675.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	246.529.802
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.078.954.802
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.078.954.802

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.